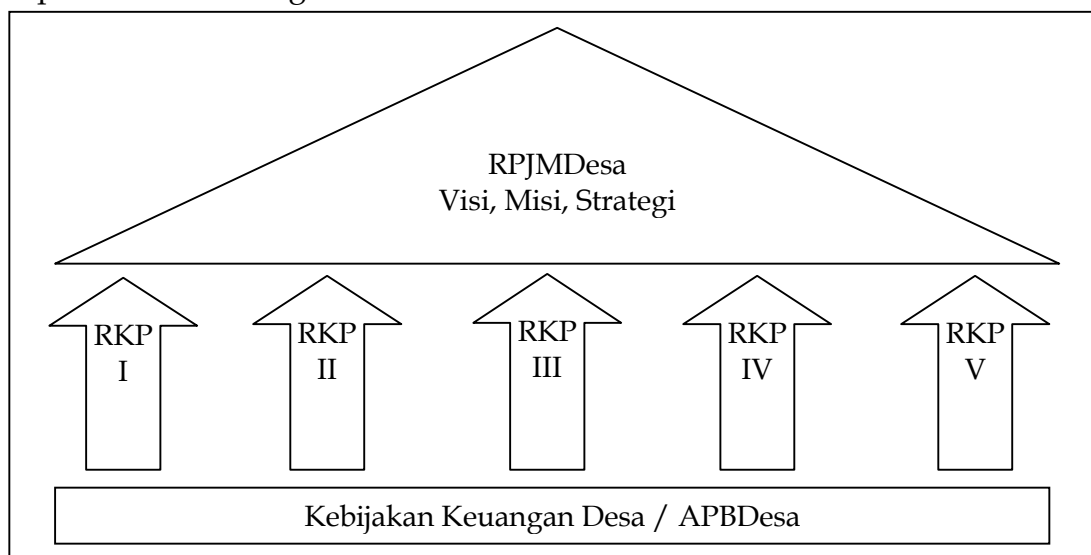


BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
SERTA KERANGKA PENDANAAN

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan pemerintahan tersebut diikuti dengan penerimaan sumber-sumber pendapatan desa yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Analisis pengelolaan keuangan desa pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan desa dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan desa. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan desa diwujudkan dalam suatu APBDesa dan laporan keuangan desa sekurang-kurangnya 5 tahun sebelumnya, dimana dalam dokumen ini adalah tahun 2008-2012.

Hubungan antara dokumen perencanaan strategis dengan anggaran, dapat dilihat dalam gambar berikut :



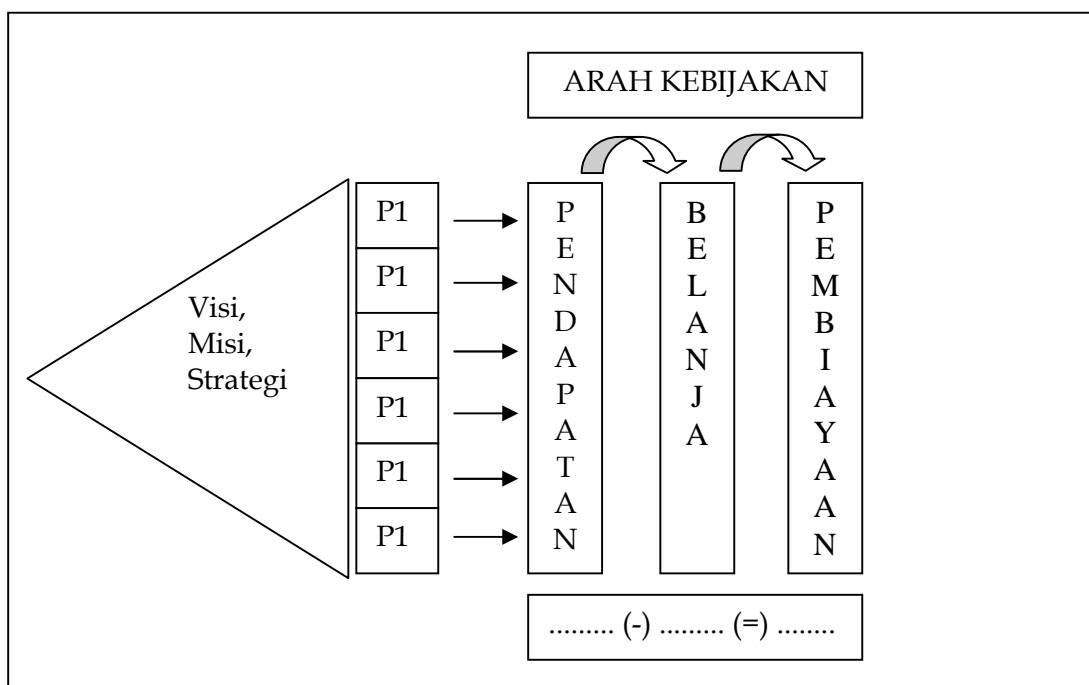
Gambar 3.1
Kerangka Hubungan Antara Keuangan Desa/ APBDesa dengan RKP-Desa
dan Visi, Misi Strategi RPJM-Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Peraturan Desa. Dalam hubungannya dengan RPJM-Desa, APBDesa merupakan komitmen penyelenggara pemerintah desa untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun.

Arah kebijakan keuangan desa yang diambil oleh Desa Jatilor mengandung makna :

- a. Arah belanja APBDesa Jatilor digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah 5 tahunan;
- b. Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan desa diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang substansial dan dengan jumlah yang memadai.

Mengingat kebijakan masing-masing komponen APBDesa berbeda, maka kebijakan keuangan desa juga dirinci pada masing-masing komponen tersebut, meliputi kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Adapun hubungan strategi dengan arah kebijakan komponen APBDesa dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 3.2
Kerangka Hubungan Antara Strategi dengan Komponen APBDesa

Gambar diatas menunjukkan hubungan antara proses perencanaan kegiatan dengan keuangan desa. Satuan terkecil dari perencanaan strategis adalah program dan kegiatan. Melalui analisis belanja, standar pelayanan, dan standar harga atas komponen belanja tiap kegiatan dapat dihitung kebutuhan belanja. Dengan demikian, arah kebijakan belanja Desa Jatilor pada prinsipnya adalah agar belanja dapat mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan, sehingga belanja yang tidak strategis dan tidak mempunyai nilai tambah dapat diminimalisir.

Pada tahap berikutnya, untuk menutup semua kebutuhan belanja, APBDesa harus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBDesa selama ini diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (*intensifikasi*), dan diupayakan sumber-sumber baru (*ekstensifikasi*) oleh Pemerintah Desa Jatilor.

Mengingat bahwa komponen APBDesa menggunakan struktur surplus/defisit, maka selisih antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai surplus/defisit dan dialokasikan ke pembiayaan. Dalam hal APBDesa mengalami defisit, maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan kas untuk menutup defisit tersebut (penerimaan pembiayaan). Sebaliknya, apabila APBDesa mengalami sisa lebih, maka atas surplus tersebut akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang antara lain menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,

transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa, dan selanjutnya APBDesa tersebut dijadikan dasar bagi pemerintah desa dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran desa yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan desa, oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran desa, struktur pendapatan dan struktur belanja desa.

3.1 Kinerja Keuangan Desa Tahun 2008-2012

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2008-2012 memberikan gambaran tren yang positif dengan rata-rata mengalami kenaikan, walaupun pada masa itu terjadi kenaikan BBM yang sempat mengguncangkan perekonomian nasional dan membawa dampak yang signifikan pada perekonomian secara makro. Namun dikarenakan perekonomian Desa Jatilor berbasis pada sektor pertanian yang merupakan sektor primer sehingga dampak kenaikan BBM tidak begitu terasa.

Pendapatan Asli Desa (PADesa) Desa Jatilor selama tahun 2008-2012 menunjukkan angka perkembangan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 realisasi PADesa mencapai Rp 664.056.704,- dan terus meningkat dari tahun ke tahun sampai mencapai Rp 880.016.603,- pada tahun 2012. Demikian pula pada sumber pendapatan desa yang berasal dari Dana Perimbangan yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) juga mengalami peningkatan selama kurun waktu 2006-2010 yaitu dari sebesar Rp 50.464.000,- pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp 52.275.000,- pada tahun 2012. Pada sumber pendapatan desa yang bersumber dari bantuan pemerintah juga menunjukkan angka peningkatan yaitu dari sebesar Rp 2.478.650,- pada tahun 2008 meningkat signifikan yakni Rp 38.138.300 di tahun 2012. Selain hal itu mulai dari tahun 2011 Pendapatan desa ditopang adanya Sumbangan Pihak Ketiga sebesar Rp 40.000.000,- setiap tahunnya.

Gambaran perkembangan struktur pendapatan desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Desa Jatilor Tahun 2008-2012

KO DE	JENIS PENDAPATAN	2008		2009		2010		2011		2012	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1,1	Pos Pendapatan Asli Desa	764.010.000	664.056.074	744.090.000	743.845.698	935.833.608	935.598.274	812.462.350	811.946.027	880.810.086	880.016.603
1,2	Pos Bagi Hasil	2.478.650	2.478.650	2.503.650	2.503.650	2.503.650	2.503.650	3.450.000	3.450.000	4.500.000	4.500.000
1,3	Bagian Dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah (ADD)	50.464.000	50.464.000	51.403.000	51.403.000	51.085.000	51.085.000	51.385.000	51.385.000	52.275.000	52.275.000
1,4	Pos Bantuan Pemerintah	-	-	31.664.943	31.664.943	40.279.914	40.279.914	42.523.375	42.279.914	40.279.914	38.138.300
1,5	Pos Hibah	-	-	-	-	15.000.000	12.750.000	-	-	-	-
1,6	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	43.000.000	43.000.000	40.000.000	40.000.000
JUMLAH PENDAPATAN		816.952.650	716.998.724	829.661.593	829.417.291	1.049.702.172	1.047.216.838	952.820.725	952.060.941	1.017.865.000	1.014.929.527
% Kenaikan Realisasi /tahun		-		15,67		26,25		-		66,03	

Sumber Data : Bendahara Penerimaan Desa Jatilor Tahun Anggaran 2008-2012

Kontribusi nyata pada pembentukan Pendapatan Desa secara keseluruhan selama tahun 2008-2012 dari tahun ke tahun menderung mengalami kenaikan, meskipun pada tahun 2011 sempat mengalami penurunan. Pada tahun 2009 Pendapatan Desa secara keseluruhan mengalami kenaikan dengan pertumbuhan sebesar 15,57%, selanjutnya terjadi peningkatan di tahun 2010 sebesar 26,25%, meskipun di tahun 2011 terjadi penurunan namun di tahun 2012 terjadi kenaikan sebesar 66,03%.

Pada sisi Belanja Desa Jatilor, nampak bahwa perkembangan Belanja Tidak Langsung cenderung lebih cepat dibanding laju perkembangan laju perkembangan Belanja Langsung. Selama kurun waktu 2008-2012, pertumbuhan Belanja Tidak langsung Desa Jatilor meningkat. Pada sisi lain perkembangan Belanja Langsung selama kurun waktu yang sama sempat mengalami penurunan pada tahun 2009 seiring terjadinya penyesuaian pos-pos belanja pada struktur belanja desa.

Rincian perkembangan Belanja Desa Jatilor pada tahun 2008-2012 adalah sebagaimana tertera dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Belanja Desa Jatilor tahun 2008-2012

No	Uraian	TAHUN				
		2008	2009	2010	2011	2012
I	Belanja Langsung	712.439.869	298.402.140	331.723.297	317.593.948	332.299.300
1	Belanja Pegawai	337.750.000	59.854.443	78.528.914	76.242.064	80.743.050
2	Belanja Barang & Jasa	149.997.219	56.484.597	67.662.383	60.923.234	86.741.250
3	Belanja Modal	224.692.650	182.063.100	185.532.000	180.428.650	164.815.000
II	Belanja Tidak Langsung	2.953.500	535.269.000	717.818.500	647.007.650	691.630.500
1	Belanja Pegawai	-	448.850.000	649.681.000	574.646.800	631.873.000
2	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
3	Belanja Hibah	-	-	-	1.650.000	-
4	Belanja Bantuan Sosial	-	7.200.000	20.880.000	39.420.000	22.200.000
5	Belanja Bantuan Keuangan	-	79.219.000	47.257.500	31.290.850	37.557.500
6	Belanja Tak Terduga	2.953.500	-	-	-	2.015
	JUMLAH BELANJA	715.393.369	833.671.140	1.049.541.797	964.601.598	1.023.929.800

Sumber Data : Bendahara Pengeluaran Desa Jatilor Tahun Anggaran 2008-2012

Tabel 3.3

Rasio Realisasi Pendapatan dengan Belanja Desa Jatilor tahun 2008-2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Pendapatan	716.998.724	829.417.291	1.047.216.838	952.060.941	1.014.929.527
2	Belanja	715.393.369	833.671.140	1.049.541.797	964.601.598	1.023.929.800
	% Belanja terhadap Pendapatan	99,77	100,51	100,22	101,31	100,88

Sumber Data : Bendahara Pengeluaran Desa Jatilor Tahun Anggaran 2008-2012

Tabel 3.4

Realisasi Pembiayaan Desa Jatilor tahun 2008-2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
3.1	<i>Penerimaan</i>	23.286.909	54.142.894	2.971.045	12.646.086	21.105.429
	SiLPA	13.286.909	14.142.894	2.971.045	646.086	105.429
	Penjualan Kekayaan Desa dipisahkan	-	-	-	-	
	Pencairan dana Cadangan	-	-	-	-	
	Penerimaan Pinjaman	10.000.000	40.000.000	-	12.000.000	21.000.000
3.2	<i>Pengeluaran</i>	10.750.000	46.918.000	-	-	12.000.000
	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	-	-	-	-	
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	
	Pembayaran Utang & Bunga	10.750.000	46.918.000	-	-	12.000.000
	Jumlah Pembiayaan	12.536.909	7.224.894	2.971.045	12.646.086	9.105.429

Sumber Data : Bendahara Pengeluaran Desa Jatilor Tahun Anggaran 2008-2012

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2008-2012

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa Tahun 2008-2012

Pengelolaan Pendapatan Desa Jatilor tahun 2008-2012 diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas desa dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber-sumber pendapatan desa meliputi Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Dana Perimbangan atau Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Pemerintah/Pemerintah

Provinsi/Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Sumber pendapatan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa terdiri dari Hasil Usaha Desa, Hasil kekayaan Desa, Lain-lain Kekayaan Milik Desa, Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

Untuk mendukung pembelanjaan desa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan strategis berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru. Upaya-upaya yang dilakukan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap penerimaan pendapatan desa yaitu Upaya Intensifikasi dilakukan dengan cara pembayaran lelang/sewa tanah kas desa secara tunai. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan dengan mencari sumber-sumber pendapatan baru atau obyek pendapatan baru.

3.2.2 Arah Pengelolaan Belanja Desa Tahun 2008-2012

Suatu arah pengelolaan belanja desa dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh kegiatan strategis dapat dibiayai oleh APBDesa. Belanja desa dilakukan seefektif mungkin membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan formulasi dalam program dan kegiatan. Belanja desa diklasifikasikan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

3.2.3 Arah Pembiayaan Tahun 2008-2012

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan anatar lain berasal dari sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya, penjualan kekayaan desa dan pinjaman,

sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal desa, pembentukan dana cadangan dan pembayaran pinjaman.

3.3 Kerangka Pendanaan Tahun 2014-2018

Keuangan Desa dalam bentuk PADesa menjadi sangat strategis dan menjadi isu sentral tersendiri apalagi kondisi kapasitas dan rasionalitas APBDesa Jatilor dibandingkan jumlah penduduk dan tugas-tugas pemerintah desa masih sangat kecil.

3.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan

Difokuskan pada upaya penggalan PADesa walaupun tetap dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan membebani UMKM dan masyarakat secara berlebihan. Selain itu perlu dilakukan upaya peningkatan optimalisasi dana perimbangan termasuk bagi hasil dan bantuan pemerintah serta tidak kalah pentingnya adalah mengembangkan sumber pendapatan dari sumber pendapatan lain-lain yang sah termasuk hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Tahap perencanaan pendapatan menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja dan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Oleh karena itu pengelolaan pendapatan desa harus dilakukan secara cermat, tetap dan penuh kehati-hatian. Pemerintah desa dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang bukan hanya mampu menjamin seluruh pendapatan desa dapat terkumpul dan diterima dalam kas desa tetapi mampu merumuskan kebijakan anggaran pendapatan desa mulai dari perencanaan. Perencanaan pendapatan desa merupakan proses yang paling krusial dalam penentuan besarnya alokasi anggaran yang akan dimanfaatkan untuk membiayai program kegiatan.

Oleh karenanya Pemerintah Desa Jatilor senantiasa berupaya memaksimalkan potensi yang ada disamping terus menggali potensi yang selama ini belum tersentuh.

3.3.2 Arah Kebijakan Belanja

Difokuskan pada belanja untuk membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberian stimulan maupun motivasi pengembangan serta bantuan kepada lembaga kemasyarakatan di desa yang sinergi dengan program-program pembangunan yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi dan kebijakan pembangunan desa.

Pemerintah Desa Jatilor berupaya menetapkan target capaian dan mengupayakan agar belanja modal mendapat porsi yang lebih besar dari belanja pegawai atau belanja barang dan jasa.

3.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan desa dipersiapkan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya diikuti dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pengelolaan dan/atau pelaksanaan pembiayaan desa dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan desa (PPKD).

Secara umum Pemerintah Desa pada waktu penyusunan APBDesa akan menganut prinsip “prakiraan maju” yaitu perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dibuat lebih besar daripada tahun berjalan agar kesinambungan program dapat lebih terjamin pelaksanaannya.

Adapun perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk 5 tahun ke depan diproyeksikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5

Proyeksi Pendapatan Desa Jatilor tahun 2014-2018

No	Uraian	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pendapatan Asli Desa	1.029.367.000	1.017.000.000	1.055.000.000	1.060.000.000	1.062.000.000
2	Bagi Hasil	7.450.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000
3	Bagian Dana Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah (ADD)	52.213.000	53.000.000	53.500.000	54.000.000	55.000.000
4	Bantuan Pemerintah	138.762.000	150.000.000	150.000.000	60.000.000	65.000.000
5	Hibah	0	0	0	0	0
6	Sumbangan Pihak Ketiga	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
JUMLAH PENDAPATAN		1.267.792.000	1.268.000.000	1.307.000.000	1.223.000.000	1.231.500.000

Tabel 3.6

Proyeksi Belanja Desa Jatilor tahun 2014-2018

No	Uraian	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
I	Belanja Langsung	521.382.400	472.000.000	586.000.000	508.000.000	518.000.000
1	Belanja Pegawai	94.076.000	90.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000
2	Belanja Barang & Jasa	66.071.400	80.000.000	88.000.000	85.000.000	85.000.000
3	Belanja Modal	361.325.000	302.000.000	406.000.000	328.000.000	338.000.000
II	Belanja Tidak Langsung	726.409.600	776.000.000	701.000.000	695.000.000	693.500.000
1	Belanja Pegawai	650.094.000	655.000.000	595.000.000	595.000.000	595.000.000
2	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
3	Belanja Hibah	5.000.000	0	3.000.000	0	0
4	Belanja Bantuan Sosial	27.900.000	80.000.000	48.000.000	40.000.000	38.500.000
5	Belanja Bantuan Keuangan	43.414.100	40.000.000	55.000.000	60.000.000	60.000.000
6	Belanja Tak Terduga	1.500	1.000.000	1.000.000	0	0
JUMLAH BELANJA		1.247.792.000	1.248.000.000	1.287.000.000	1.203.000.000	1.211.500.000

Tabel 3.7

Proyeksi Pembiayaan Desa Jatilor tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
3.1	<i>Penerimaan</i>					
	SiLPA	0	0	0	0	0
	Penjualan Kekayaan Desa dipisahkan	0	0	0	0	0
	Pencairan dana Cadangan	0	0	0	0	
	Penerimaan Pinjaman	0	0	0	0	
3.2	<i>Pengeluaran</i>					
	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	
	Pembayaran Utang & Bunga	0	0	0	0	
	Jumlah Pembiayaan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000